

TAHUN
2020



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Yogyakarta
Jln.Kenari No.56
(0274)515665
DPMPPA.jogjakota.go.id**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 30 Desember 2020
KEPALA DPMPPA

Ir.Edy Muhammad
NIP 19630916 199203 1 006

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran I

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Capaian	%
		2020	2020	Capaian
Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	29,00%	40.59%	139.97%

b. Sasaran II

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Capaian	%
		2020	2020	Capaian
Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,12%	0,09%	127.03%

c. Sasaran III

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Capaian	%
		2020	2020	Capaian
Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,13%	0,04%	166.33%

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Anak .

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kampung
2. Menumbuhkan kesadaran OPD dalam komitmennya untuk membuat dan mengumpulkan GAP GBS dalam mewujudkan PPRG
3. Meningkatkan pemahaman kepada OPD dalam mengintegrasikan isu gender dalam penyusunan ARG
4. Peningkatan jejaring kerja untuk pemberdayaan masyarakat dan perempuan dengan 5 K (komunitas, korparet, kampung, Pemkot, kampus)
5. Peningkatan kualitas dan kualitas SDM terlatih dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Peningkatan pemahaman terhadap Aparat kelurahan dan masyarakat tentang hak anak dan pentingnya perlindungan anak

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Fungsi dan Tugas	2
1.3 Isu-Isu Strategis	4
1.4 Keadaan Pegawai	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	6
1.6 Keuangan	8
1.7 Sistematika LKJIP	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan Strategis	12
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	14
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	14
2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	21
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020	22
2.3.1 Target Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta	22
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020	24
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	25
3.3 Realisasi Anggaran	50
3.4 Inovasi	55
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN- LAMPIRAN	63

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan	5
Tabel 1.2 Data Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan	6
Tabel 1.3 Keadaan sarana dan prasarana	6
Tabel 1.4 Alokasi Anggaran Tahun 2020	9
Tabel 1.5 Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Program Tahun 2020	9
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022	13
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak	14
Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan.....	15
Tabel 2.4. Program Pemberdayaan Masyarakat	15
Tabel 2.5 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	16
Tabel 2.6 Program Perlindungan Anak	20
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	21
Tabel 2.8 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	22
Tabel 2.9 Target Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak APBD Perubahan Tahun 2020	22
Tabel 2.10 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	23
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020	24
Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	25
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	26
Tabel 3.5 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	28
Tabel 3.6 Indikator program Pemberdayaan Masyarakat	29
Tabel 3.7 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya	29
Tabel 3.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	32
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	32
Tabel 3.10 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	35

Tabel 3.11 Indikator program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	36
Tabel 3.12 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya	37
Tabel 3.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	40
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	40
Tabel 3.15 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	44
Tabel 3.16 Indikator Program Perlindungan Anak	44
Tabel 3.17 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya	46
Tabel 3.18 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020	50
Tabel 3.19 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020	51
Tabel 3.20 Realisasi Belanja Langsung 2020	51
Tabel 3.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020	54
Tabel 3.22 Analisis efisiensi	55

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

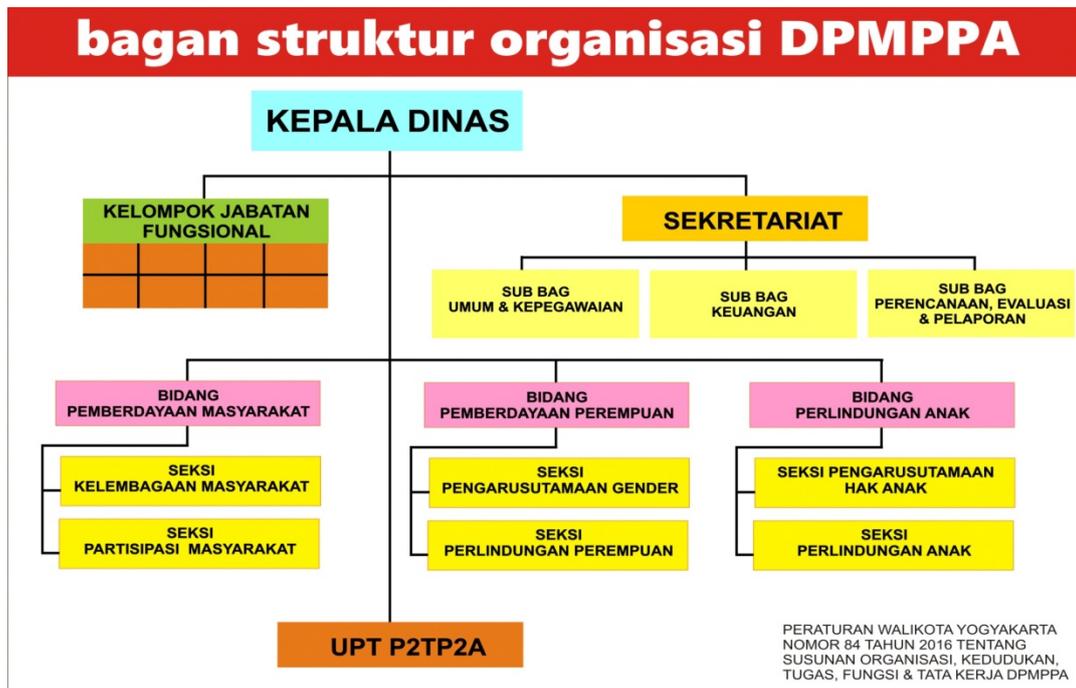
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta
2. Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1.1 Bagan struktur organisasi DPMPPA

1.2 Fungsi dan Tugas

Sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta, susunan organisasinya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional yang masing masing mempunyai Tugas.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.

Sekretariat

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, dan administrasi kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban.

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pemberdayaan masyarakat.

1. Seksi Kelembagaan Kemasyarakatan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang kelembagaan kemasyarakatan.

2. Seksi Partisipasi Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang partisipasi masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang pemberdayaan perempuan.

1. Seksi Pengarusutamaan Gender

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender.

2. Seksi Perlindungan Perempuan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang perlindungan perempuan.

Bidang Perlindungan Anak

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang perlindungan anak.

1. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang Pengarusutamaan Hak Anak.

2. Seksi Perlindungan Anak

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang perlindungan anak.

UPT P2TP2A

UPT P2TP2A merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan berbasis gender, UPT P2TP2A dipimpin oleh kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi

Untuk melaksanakan sebagian kewenangan daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, serta pelaksanaan ke-tata-usahaan.

UPT P2TP2A mempunyai fungsi penyelenggaraan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak berbasis gender.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak, antara lain sebagai berikut:

1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan;
2. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak;
3. Masih adanya kematian bayi, balita, dan ibu;
4. Kesenjangan akses perempuan dalam bidang ekonomi
5. Berkurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative secara tidak langsung berdampak pada tidak terangkatnya isu perempuan ke dalam wilayah public;

6. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak antara lain meningkatnya perkawinan di bawah umur , anak berhadapan dengan hukum (ABH), kehamilan tidak dikehendaki di kalangan remaja, tindak kekerasan di media online seperti pelecehan seksual, kasus pornografi, *cyber crime* dll;
7. Keterlibatan anak pada kegiatan pengendalian masa anak jalanan (manusia silver)
8. Terjadinya pandemi covid 19 yang menimbulkan dampak pada pengasuhan anak sehingga rentan terhadap terjadinya kekerasan.

1.4 Keadaan Pegawai

- Per 31 Desember 2020 jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta sebanyak 20 orang, terdiri dari : laki-laki 7 orang (35%) dan perempuan 13 orang (65%).
- **Berdasarkan Pangkat Dan Golongan**

Tabel 1.1 Data kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan

JABATAN STRUKTURAL	PANGKAT/GOL	JUMLAH
Kepala	Pembina Utama Muda, IV/C	1 orang
Sekretaris	Pembina Tk I / IV b	1 orang
Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I / III.d	2 orang
Kepala Bidang	Pembina / IV a	2 orang
Kepala Seksi	1. Penata / III.c	2 orang
	2. Penata Tk. I / III.d	3 orang
Fungsional Umum	1. Penata Muda / III.a	1 orang
	2. Penata Muda Tk I / III.b	3 orang
	3. Penata Tk. I / III.d	1 orang
	4. Penata / II/c	1 orang
Kepala UPT	Pembina / III/d	1 orang
Kepala Sub Bagian TU UPT	Penata Muda Tk. I / III.b	1 orang

- Berdasar tingkat pendidikan

Tabel 1.2 Data kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan

No	Kategori	Pendidikan				
		SMP	SMA	D3	S1	S2
1	Eselon IIB				1	
2	Eselon III a				1	
3	Eselon IIIb				1	1
5	Eselon IV a		1	2	4	1
6	Eselon IV b				1	
7	Fungsional Umum		4	1	1	
8	Fungsional tertentu			1		
	Jumlah		5	4	9	2

Jumlah pegawai ideal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta sesuai analisa jabatan adalah sebanyak 51 orang, namun pegawai yang ada 20 orang sehingga baru terpenuhi sebesar 39.21% .

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta relatif mencukupi meskipun masih diperlukan penambahan/perbaikan.

Secara garis besar sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta sebagai berikut

Tabel 1.3 Keadaan sarana dan prasarana

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Pompa Air	1 buah
2	Minibus	7 Unit
3	Sepeda Motor	13 Unit
4	Sepeda	1 unit
5	Penyemprot Otomatis (Automatis Spayer)	3 buah
6	Mesin Ketik	4 buah
7	Mesin presensi sidik jari	1 buah
8	Kalkulator	2 buah
9	Almari Besi	12 buah
10	Rak Besi	20 buah
11	Filing Besi	33 buah

12	Kardek besi	1 buah
13	Brankas	1 buah
14	Almari Lereg Kaca	6 buah
15	Contener Box Besar	10 buah
16	Papan nama, media edukasi, neon box	4 buah
17	Papan nama	100 buah
18	White Board	7 buah
19	Lemari kayu	34 buah
20	Rak Front Office	24 buah
21	Meja Biasa Kayu	3 buah
22	kursi besi	5 buah
23	Kursi biasa bertangan	39 buah
24	Kipas Angin	8 buah
25	Zice / Kursi tamu	8 buah
26	Laser Pointer	3 buah
27	Meja Rapat	48 buah
28	Meja komputer	65 buah
29	Sofa	7 buah
30	Kasur vinil 120 x 200 m	8 buah
31	Baby Dress Table	17 buah
32	Jam Dinding	7 buah
33	Mesin Cuci	4 buah
34	Kulkas Mini	5 buah
35	AC 0,5 PK	26 buah
36	Kipas angin berdiri	16 buah
37	Exhoust Fan	1 buah
38	Air Purifier (CHT)	1 buah
39	Kompor Gas	1 buah
40	Tabung Gas, isi 12 kg	1 buah
41	Televisi 21 inchi	6 buah
42	Amplifier 120W	1 buah
43	Speaker 30W	2 buah
44	Pengeras Suara	4 buah
45	WIRELESS PUBLIC ADDRESS	4 buah
46	UPS	3 buah
47	Kamera video Digital	2 buah
48	Tangga Almunium	2 buah
49	Cermin	1 buah
50	Dispenser	7 buah
51	Hand Dryer	1 buah
52	Tempat pot tanaman	4 buah
53	Korden	1 buah
54	Soap Dispencer	1 buah
55	Alat Pemadam Api Ringan	5 buah

56	PC Unit	35 buah
57	Lap Top (Note Book)	19 buah
58	Scanner	1 buah
59	Printer	21 buah
60	LCD Projector	10 buah
61	Router	7 buah
62	Switch	2 buah
63	Wallmount Rack	2 buah
64	Meja rapat	7 buah
65	Box bayi	10 buah
66	Camera	3 buah
67	Projector	4 buah
68	Telphon/Hp	4 buah
69	Mic Wireless	1 buah
70	CCTV	1 buah
71	Layar LCD	2 buah
72	Main Distribution Frame(MDF)+Lsa Krone kap.20 pair	3 buah
73	Thermometer	10 buah
74	Panjatan Jala(Edukasi anak)	6 buah
75	Bangunan Gedung Kantor DPMPPA	4 buah
76	Canopi DPMPPA	1 buah
77	Buku Perpustakaan	337 buah
78	Trophy	2 buah

Terkait dengan kebutuhan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta sudah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk kebutuhan peralatan inventaris aset daerah juga sudah sesuai dengan beban kerja yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.665.716.765,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.941.933.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.723.783.765,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 3.723.783.765 - yang didukung oleh 6 program dan 13 kegiatan.

Tabel 1.4 Alokasi Anggaran Tahun 2020

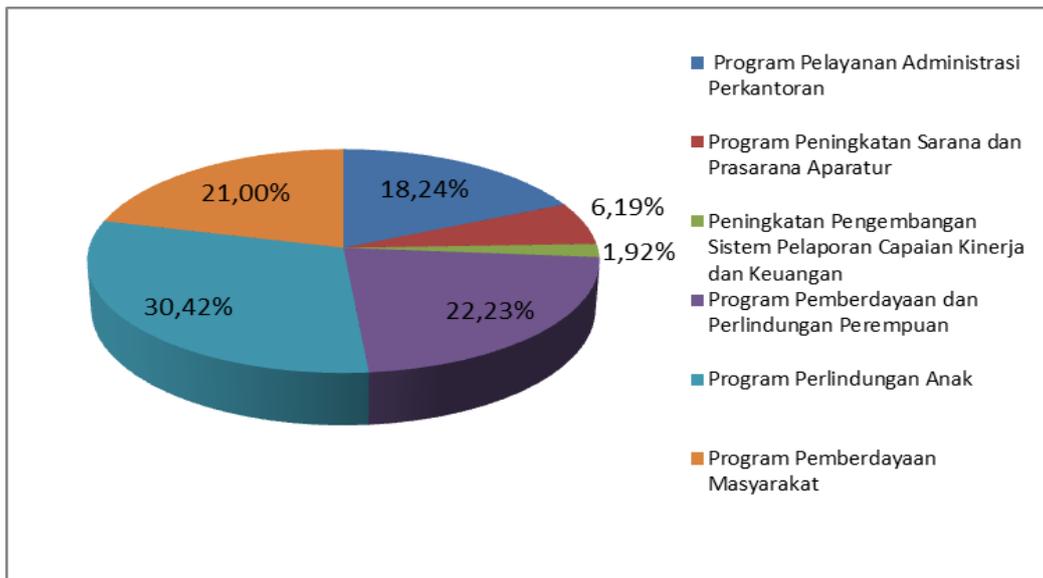
No	Uraian	Anggaran	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 1.941.933.000	34,28%
2	Belanja Langsung	Rp 3.723.783.765	65,72%
Jumlah Anggaran		Rp 5.665.716.765	100 %

Sumber : APBD-P Kota Yogyakarta, 2020

Tabel 1.5 Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Program Tahun 2020

Program	Anggaran	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp679.240.918,00	18,24%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp230.659.928,00	6,19%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp71.402.824,00	1,92%
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Rp827.746.108,00	22,23%
Program Perlindungan Anak	Rp1.132.591.976,00	30,42%
Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp782.142.011,00	21,00%
Total	Rp3.723.783.765,00	100,00%

Sumber : APBD-P Kota Yogyakarta, 2020



1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapainya dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara

memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2020*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2020*

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan manifestasi komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut,

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan	1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat	1. Kemiskinan Masyarakat Menurun
		2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat
		3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat
	2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	1. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun
		2. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
	3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	1. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
	4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	1. Kualitas pendidikan meningkat
		2. Harapan hidup masyarakat meningkat
		3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
	5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
		2. Kualitas lingkungan hidup meningkat
	6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	1. Infrastruktur wilayah meningkat
	7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai OPD utama yang mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah **Keberdayaan Masyarakat Meningkat** dengan indikator capaian sasaran **Indeks Keberdayaan Masyarakat**.

Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi pendukung untuk sasaran daerah Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun, Kualitas pendidikan meningkat, Harapan hidup masyarakat meningkat, dan Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak selama 5 tahun anggaran adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan					
				2017	2018	2020	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	%	26,15%	27,00%	28,00%	29,00%	30,00%	31,00%
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,65%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%	0,10%
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,74%	0,15%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Program Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Kelembagaan kemasyarakatan
			Pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pembinaan Pengarusutamaan Gender
			Pembinaan partisipasi dan perlindungan perempuan
			Operasional P2TP2A
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Program Perlindungan Anak	Pembinaan pengarusutamaan Hak Anak
			Pembinaan partisipasi dan perlindungan anak

Untuk mendukung pencapaian kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak didukung dengan pelaksanaan Program Kegiatan dengan masing-masing indikator program adalah:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat

Indikator kinerja : Indeks Pemberdayaan Masyarakat berbasis kampung menggambarkan hasil skoring indeks keberdayaan masyarakat. Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan target sebesar 29 %.

Tabel 2.4. Program Pemberdayaan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target	
			Murni	Perubahan
1	Program Pemberdayaan Masyarakat			
1.1	Kegiatan kelembagaan kemasyarakatan	Kelembagaan LPMK yang didampingi	45 LPMK	45 LPMK
		Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta yang didampingi	TP PKK Kota Yogyakarta	TP PKK Kota Yogyakarta
		Evaluasi kelembagaan masyarakat	91 lembaga	91 lembaga
1.2	Kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat	Swadaya murni masyarakat yang didata	45 kelurahan	45 kelurahan

dalam pembangunan	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan	3 tahap	3 tahap
	Pokjantal Posyandu yang didampingi	14 pokjantal	14 pokjantal
	Kelurahan lokasi P2WKSS yang didampingi	10 kelurahan	10 kelurahan
	Kampung yang dibina dan dievaluasi	45 kampung	11 kampung
	Forum gandeng gendong	1 dokumen	1 dokumen

Pencapaian target indikator Indeks Pemberdayaan Masyarakat berbasis kampung dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan kemasyarakatan

Indikator Indeks Pemberdayaan Masyarakat berbasis kampung pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan kemasyarakatan melaksanakan kegiatan kelembagaan LPMK yang didampingi, evaluasi kelembagaan masyarakat dan kelembagan PKK yang didampingi

1.2 Kegiatan Pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Kegiatan Pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan indicator Indeks Pemberdayaan Masyarakat berbasis kampung melaksanakan kegiatan dodolan kampung, dan forum gandeng-gendong.

2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Indikator kinerja : Prevalensi kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan target sebesar 0,12 %. Untuk angka kekerasan perempuan diharapkan dapat menurun setiap tahun.

Tabel 2.5 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target	
			Murni	Perubahan
1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan			
1.1	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	OPD yang melaksanakan ARG	51OPD	30 OPD
		Kelompok Sadar Gender yang didampingi	6Kelompok	0Kelompok
		Data Pilah	1 Dokumen	1 Dokumen

		Gender dan Anak		
		Frekuensi Pendampingan Kelembagaan Organisasi Perempuan	10 kali	2 kali
		Gender Corner	5 kali	1 kali
		Penyusunan kajian analisis isu gender	2 dokumen analisis isu gender	1 dokumen analisis isu gender
		Gender Champion	2 kali	0 kali
1.2	Pembinaan partisipasi dan perlindungan perempuan	Pendidikan politik perempuan	2 kali	1 kali
		Frekuensi pendidikan hari besar perempuan dan hari anti kekerasan	3 kali	1 kali
		Kelompok Rintisan Usaha Prima Amarta Baru yang dibentuk dan didampingi	9kelompok	0kelompok
		Pengembangan Kelompok Rintisan Usaha Prima amarta Tahap 2 dan Tahap 3	14 kelompok	13 kelompok
		Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang didampingi	14 satgas kecamatan	0 satgas kecamatan

		Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) yang didampingi	4 kali	1kali
		Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan Anak (PUSPA) yang didampingi	2 kali	1 kali
		Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang didampingi	2 kali	0 kali
		Frekuensi Peningkatan kapasitas kader penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	4 kali	4 kali
		Lembaga layanan keluarga yang ditingkatkan kapasitasnya	2 kali	0 kali
1.3	Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan	Penanganan Korban Kekerasan terhadap anak dan perempuan berbasis Gender	50kasus	50kasus

an Anak (P2TP2A)	Peningkatan kapasitas tentang perundangan kekerasan pada lokus	4 kali	0 kali
	Peningkatan kapasitas pelayanan	1 kali	0 kali
	Penguatan satgas siap gerak anti kekerasan	115 orang	105 orang
	rehabilitasi korban kekerasan	30 orang	0 orang
	Pengelolaan sistem pendataan dan pelaporan	12 bulan	12 bulan

Pencapaian target indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 2.1 Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender
- 2.2 Kegiatan Pembinaan partisipasi dan Perlindungan Perempuan
- 2.3 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Untuk mencapai prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melaksanakan kegiatan Penanganan Korban Kekerasan berbasis gender. Dalam hal ini diimplementasikan dengan rapat koordinasi lintas sektoral, pendampingan hukum dan psikologi korban, reintegrasi kasus dalam rangka meminimalisasi resiko berulangnya kejadian kekerasan sejenis pada lingkungan korban, dan trauma healing. Selain itu dilakukan pula kegiatan sosialisasi mengenai undang-undang atau ketentuan peraturan perundangan tentang kekerasan pada lokus sebagai upaya edukasi dan pencegahan kejadian kekerasan serta media promosi tentang mekanisme pelaporan, pelayanan penanganan dan pendampingan korban kekerasan di UPT P2TP2A. Dan sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan korban kekerasan di wilayah, maka dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas dalam mengimplementasikan penjangkauan dan pendampingan korban terhadap satgas sigrak sekota Yogyakarta.

Road Show Satgas Sigrak juga dilakukan dalam upaya untuk mensinergikan semua elemen masyarakat agar mempunyai tanggungjawab adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi wilayah.

3. Program Perlindungan Anak

Indikator kinerja : Prevalensi kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan target sebesar 0,14% %. Untuk angka kekerasan anak diharapkan dapat menurun setiap tahun

Tabel 2.6 Program Perlindungan Anak

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target	
			Murni	Perubahan
1	Program Perlindungan Anak			
1.1	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	Kongres Anak Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali
		Dekelana(desa/kelurahan layak anak) baru	10 kelurahan	10 kelurahan
		Dekelana (desa/kelurahan layak anak) yang didampingi	24 kelurahan	0 kelurahan
		Kelana (kecamatan layak anak) yang didampingi	12 kecamatan	0 kecamatan
		Pendampingan RAD KLA	2 kali	1 kali
		Data Indikator KLA (Kota Layak Anak) yang update dan valid	2 dokumen data	1 dokumen data
		Peringatan Hari Anak Nasional	1 kali	1 kali
		Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kota	9 kali	0 kali
		Penguatan dan Pengembangan KRA	37 KRA	0 KRA
		KRA tidak aktif yang didampingi	45 KRA	45 KRA
		Pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak(RBRA)	1 lokasi	0 lokasi
		Penguatan peran media masa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	3 kali	1 kali
		Penguatan konvensi hak anak	2 kali	2 kali
		1.2	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak	sekolah ramah anak yang dibentuk
pendampingan sekolah ramah anak	20 sekolah			0 sekolah
Pengembangan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	34 patbm			10 patbm
Musyawarah Perencanaan	1 kali			1 kali

		Pembangunan Anak		
		Pencegahan kekerasan terhadap anak	4 kali	0 kali
		TPA Beringharjo ,Prabadarma, KB Kirana yang didampingi	3 lembaga	3 lembaga
		Monev SRA dan Pusra	28 lokasi	0 lokasi
		Pusat Pembelajaran keluarga yang dibentuk	1 lembaga	1 lembaga
		Perlindungan Khusus Anak	3 kasus	1 forum

Pencapaian target indikator prevalensi kekerasan terhadap anak dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak

1.2 Kegiatan Pembinaan partisipasi dan Perlindungan Anak

Di dalam kegiatan tersebut mengampu berbagai bentuk pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan masyarakat, aparat di wilayah, TP PKK Kota Yogyakarta dan sekolah ramah anak.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	%	29
2	Perlindungan Perempuan dan Anak meningkat	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,12
		Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,13

Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan agar kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak lebih terukur, untuk sasaran yang berubah adalah sasaran perlindungan perempuan dan anak meningkat pada saat reviu renstra sasaran tersebut diubah menjadi kekerasan terhadap perempuan menurun dengan indikator kinerja prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak menurun dengan indikator kinerja prevalensi kekerasan terhadap anak. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3	4	5
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	%	29
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,12
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,13

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.9.456.432.620,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.1.973.167.000,- dan Belanja Langsung Rp.7.483.265.620,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp.5.665.716.765,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.1.941.933.000,- dan Belanja Langsung Rp.3.723.783.765,-.

2.3.1 Target Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

**Tabel 2.9
Target Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,
dan Perlindungan Anak APBD Perubahan Tahun 2020**

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp 1.941.933.000	34,28%
Belanja Langsung	Rp 3.723.783.765	65,72%
Jumlah	Rp 5.665.716.765	100%

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Rp782.142.011,00	21,00%	APBD
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Rp827.746.108,00	22,23%	APBD
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Rp1.132.591.976,00	30,42%	APBD

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2020*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis	%	29	40.59%	139.97%

		Kampung				
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,13	0,08 %	133,33%
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,14	0,04 %	169,23%

Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran yang terbagi dalam 3 (tiga) indikator. Pada tahun 2020, ketiga indikator telah memenuhi target yang ditetapkan dan **tercapai $\geq 100\%$** . Capaian yang tertinggi pada indikator prevalensi kekerasan terhadap anak dengan persentase 169,23% , sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah dibandingkan dengan indikator lainnya adalah indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dengan capaian 133,33 %.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Pemberdayaan masyarakat meningkat

Tolok ukur capaian sasaran **Pemberdayaan masyarakat meningkat** diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	Hasil skoring deklarasi keberdayaan kampung

Kinerja sasaran Pemberdayaan masyarakat meningkat dengan indikator Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	39,82%	29%	40.59%	139.97%	31%	130.93%

Untuk indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dihitung dengan menggunakan formula hasil skoring deklarasi kampung, di tahun 2020 terdapat penambahan 7 deklarasi kampung, oleh karena itu untuk skor deklarasi kampung pada tahun 2020 adalah sebesar 68.6 dibagi dengan 169 kampung yang tersebar di kota Yogyakarta sehingga realisasi capaian indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung pada tahun 2020 adalah 40.59 % dari target 29 % atau naik sebanyak 0.77 % dari capaian tahun 2019 yang realisasi capaiannya adalah sebesar 39.82 %, sehingga untuk indikator sasaran pemberdayaan masyarakat meningkat dikatakan berhasil mencapai target untuk tahun 2020.

Tingkat capaian sasaran tersebut pada tahun 2020 adalah sebesar 139.97 %, kenaikan capaian pada tahun 2020 didukung dengan adanya pengembangan wilayah berdasarkan potensi wilayah melalui gowes dodolan kampung dengan melibatkan OPD terkait, asosiasi LPMK dan komunitas meski demikian adapula hambatan yang dihadapi untuk mencapai sasaran tersebut yaitu penganggaran dan perencanaan kegiatan untuk pengembangan wilayah belum optimal oleh karena itu untuk mengatasi hambatan tersebut solusi yang diterapkan adalah membuat roadmap potensi kampung sesuai dengan potensi wilayah yang diwujudkan dalam masterplan kampung dengan menggandeng komunitas untuk membantu membuat perencanaan pengembangan potensi wilayah.



Ekspose dodolan kampung



Potensi Wilayah



Foto Pertemuan Forum Gage, Asosiasi LPMK dan Pelaku Wisata

Tabel 3.5 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi										
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	26,15%	28,80%	27,00%	38,98%	28,00%	39,82%	29,00%	40,59%	30,00%	0,00%	31,00%	0,00%

3.2.1.1 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah Renstra;

Capaian kinerja pada tahun 2020 yang ditargetkan sebesar 29%. Target kinerja tersebut dapat tercapai 40.59 % sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 130.93%.

Sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta berupa pemberdayaan masyarakat meningkat terealisasi 40.59 % atau tingkat capaian 130.97 % sehingga berpredikat **tercapai amat baik**

Sedangkan untuk indikator program, semua indikator dapat tercapai sangat baik karena masing –masing indikator program dapat terealisasi melampaui target seperti terlihat di dalam tabel di bawah ini :

Tabel.3.6 Indikator program Pemberdayaan Masyarakat

No.	Program	Indikator Program	2017		2018		2020		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi										
1	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	1,00%	1,01%	1,00%	1,04%	1,00%	3,25%	1,00%	2.15%	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
2.		Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	-	-	-	-	82%	83,48%	83%	84.50%	84%	0,00%	85%	0,00%

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya

No	Indikator program	Target Capaian		Realisasi Capaian Setiap Tahun			
		Thn 2019	Thn 2020	Thn 2019		Thn 2020	
				Realisasi	Tingkat Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%	1%	3,25%	325,03%	2.15%	215%
2	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	82%	83%	83,48%	101,81%	84.50%	101.81%

3.2.1.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup. Untuk keberhasilan tiap tiap indikator program yang mendukung sasaran pemberdayaan masyarakat meningkat dijabarkan sebagai berikut :

a. Persentase peningkatan swadaya masyarakat

Untuk indikator persentase peningkatan swadaya masyarakat berhasil terealisasi sebesar 2.15 % dari target sebesar 1 % , Capaian kinerja tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya meskipun tetap mencapai target tahun 2020, dimana pada tahun 2019 Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat tercapai sebesar 3.25 % sedangkan pada tahun 2020 menjadi 2.15 % untuk tingkat capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 215 %, capaian tersebut dikarenakan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah serta didorong adanya penguatan kelembagaan yang ada di masyarakat seperti posyandu , Forum Gandeng Gendong , P2WKSS

Faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah :

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	petugas pendata di kelurahan belum maksimal karena bersamaan dengan tugas dan kegiatan di wilayah	pertemuan dan pendataan dengan melibatkan kegiatan OPD yang ada di wilayah
2	pemahaman petugas di wilayah masih berbeda berkaitan dengan swadaya	pendataan dapat melibatkan unsur kelembagaan masyarakat yang ada di wilayah

b. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif

Untuk indikator persentase kelembagaan masyarakat yang aktif berhasil terealisasi sebesar 84.50 % dari target sebesar 83 % , untuk tingkat capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 101,81%, Keberhasilan indikator persentase kelembagaan masyarakat yang aktif dalam mencapai target didukung dengan adanya peran aktif dari beberapa lembaga walaupun tidak semua bisa berperan aktif serta dukungan dari pemerintah melalui OPD yang mengampu .

Faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah :

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	kurangnya kompetensi pimpinan atau pengurus lembaga kemasyarakatan sehingga lemah dalam penyusunan program dan kegiatan lembaga	Workshop terkait penguatan kelembagaan kemasyarakatan
2	kurangnya pemahaman tentang pembangunan atau yang menjadi kebijakan pemerintah sehingga dalam mengimplementasikan di kegiatan masyarakat masih belum dirasakan dampaknya oleh warga	menyusun indikator dan kemudian monitoring dan evaluasi terhadap lembaga kemasyarakatan

3.2.1.3 Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta memiliki jumlah pegawai masih kurang dari kebutuhan. Namun demikian seluruh program dan kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa pekerjaan.

Dalam hal pendanaan, serapan anggaran lebih kecil dari yang dianggarkan karena adanya efisiensi.

Sasaran Pemberdayaan masyarakat meningkat Telah mencapai kinerja sebesar 139.96 % dengan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui swadaya yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam membranding kampung sesuai dengan potensi wilayah serta munculnya kreatifitas masyarakat untuk menjual potensi kampung dan perencanaan pembangunan di wilayah yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki.

3.2.2 Sasaran Kekerasan terhadap perempuan menurun

Tabel 3.8 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Jumlah korban KDRT perempuan/ jumlah penduduk perempuan x 100 %

Kinerja sasaran Kekerasan terhadap perempuan menurun dengan indikator Prevalensi kekerasan terhadap perempuan menurun pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,10%	0,12%	0,09	127.03%	0,10%	112.44 %

Data Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan diperoleh dari membandingkan antara jumlah korban KDRT perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah korban KDRT Perempuan

Jumlah Penduduk Perempuan

186

----- x 100 % = **0,09 %**

212.422

Pada tahun 2020 capaian Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan mencapai 127.03 % , dimana dari target sebesar 0,12 % , terealisasi sebesar 0,09 % , artinya untuk sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun berhasil tercapai karena dapat mencapai target tahunan .

Capaian pada tahun 2020 didukung dengan kegiatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu dengan mensinergikan layanan yang berjejaring antara lain layanan kesehatan (RS, Puskesmas), hukum (kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri,

Pengadilan Agama, PKBH UAD, LBH Jogja, PERADI), psikologis (Puskesmas, RSA, Ananda Mentari), layanan rumah aman (RDU, Rifka Annisa), rehabilitasi sosial (Dinas Sosial, BPRSW, BRSPA); pelayanan pendampingan hukum dan psikologi; melaksanakan kegiatan reintegrasi dan psiko edukasi dalam rangka meminimalisasi resiko berulangnya kejadian kekerasan di satu lokus, peningkatan kapasitas tentang perundangan kekerasan pada lokus, pengelolaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak (SIKAP, SIGA, SIMFONI). Dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi dan mekanisme pelayanan berbasis gender terhadap korban kekerasan, maka dilakukan pula kegiatan koordinasi dengan lintas sektor, masyarakat dan Lembaga pemerhati perempuan dan anak (SAPDA, KPAI, FAKTA, LPA, Rifka Annisa WCC). Selain itu juga dilakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendampingan korban kekerasan yaitu dengan mengoptimalkan peran Satgas Sigrak di wilayah melalui kegiatan penguatan kapasitas Satgas Sigrak di Kota Yogyakarta.

Strategi yang dilakukan untuk menurunkan angka kekerasan di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Perlindungan Anak kampanye *Three Ends* yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi pada perempuan.

Dalam pelaksanaan akhiri kekerasan pada perempuan dan anak DPMPPA melaksanakan Webinar Forum Puspa, Webinar dengan PKK dan Baznas, Dapur Balita, dimana pada meja ke empat satgas Sigrak, UPT P2TP2A, dan Puspaga mengedukasi, sosialisasi dan melayani pengaduan. ,

Optimalisasi peran Forum perlindungan Korban kekerasan Kota Yogyakarta dalam situasi pandemi Covid, pelatihan penanganan kasus kekerasan kepada 4 kecamatan yaitu kecamatan Ngampilan, Pakualaman, Gedongtengen, dan Gondomanan, .

Kampanye *three ends* yang kedua yaitu akhiri perdagangan manusia DPMPPA bekerjasama dengan PKK dan Baznas melaksanakan sosialisasi webinar terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) kepada aparat kecamatan, PKK, dan kader masyarakat di 14 kecamatan, Kampanye *Three Ends* yang ketiga yaitu untuk mengurangi kesenjangan ekonomi perempuan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan pendampingan 13 kelompok rintisan usaha perempuan, pembuatan flyer bagi rintisan usaha dan UP2K PKK



Rintisan usaha

Forum PUSPA

Workshop PTPPO



Pelatihan Penanganan kasus kekerasan bagi FPKK

Webinar

Tabel 3.10 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi										
1	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,65%	0,13%	0,14%	0,11%	0,13%	0,10%	0,12%	0,09%	0,11%	0,00%	0,10%	0,00%

3.2.2.1 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah Renstra;

Capaian kinerja pada tahun 2020 yang merupakan tahun keempat Renstra 2017 – 2022 ditargetkan sebesar 0,12%. Target kinerja tersebut dapat tercapai 0,08 % sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 120 %.

Sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta berupa prevalensi kekerasan terhadap perempuan terealisasi 0,08 % atau tingkat capaian 133,33 % sehingga berpredikat **tercapai amat baik**

Sedangkan untuk indikator program yang mendukung sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun , ketiga indikator dapat tercapai sangat baik karena masing –masing indikator program dapat terealisasi melampaui target seperti terlihat di dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.11 Indikator program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

No.	Indikator program	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi								
1	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	47,00%	51,00%	53%	57,45%	59,00%	63%	64.58%	86.46%	72,00%	0,00%	78,00%	0,00%
2.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	24%	25%	36%	45,10%	47%	80,39%	58.82%	62.75%	80.39%	0%	80.39%	0%
3	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	74%	82,28%	76%	88,64%	78,00%	86,76%	80,00%	91.40%	83,00%	0,00%	86.76,00%	0,00%

Tabel 3.12 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya

No	Indikator program	Target Capaian		Realisasi Capaian			
				Thn 2019		Thn 2020	
		Thn 2019	Thn 2020	Realisasi	Tingkat Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	59,00%	64.58%	63%	106.77%	86.46%	133.88%
2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	47%	58.82%	80,39%	172,27%	62.75%	106.67%
3	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	78,00%	80,00%	86,76%	111,23%	91.40%	114,25%

3.2.2.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup. Untuk keberhasilan tiap indikator program yang mendukung sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun dijabarkan sebagai berikut ::

a. Persentase kelembagaan PUG yang aktif

Capaian kinerja tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 persentase kelembagaan PUG yang aktif baru tercapai sebesar 63 % sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 86.46 % .Pada tahun 2020 dilakukan reviu renstra untuk melakukan perubahan target dikarenakan adanya pandemi yang menyebabkan jika tidak direviu targetnya potensi tidak akan tercapai .

Berikut juga dtampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator persentase Persentase kelembagaan PUG yang aktif :

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Pembentukan dan penetapan focal point PUG dengan keputusan kepala OPD belum seluruhnya ditaati oleh OPD walaupun regulasi sudah ada	Bersama Bappeda selaku ketua Pokja PUG mengkoordinasikan tugas anggota pokja PUG (kepala OPD) dalam mengimplementasikan pembentukan focal point PUG dan monitoring

b. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG

Capaian kinerja tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG baru tercapai sebesar 80.39 % dari seluruh 51 OPD yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 62.75 % yaitu sebanyak 32 OPD di kota Yogyakarta sudah melaksanakan PPRG hal tersebut dikarenakan adanya pandemi covid 19 meskipun masih melampaui target pada tahun 2020 , walaupun demikian pada tahun 2020 dilaksanakan reviu renstra yang mengubah target pada tahun 2020 dan tahun 2021 sesuai dengan realisasi pada tahun 2019, harapannya pada tahun tersebut dapat mengejar ketertinggalan capaian pada tahun 2020.

Faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator program persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG adalah Adanya kerjasama dengan akademisi/lembaga social , program dan

kegiatan pembangunan kota Yogyakarta yang merespon isu gender sebesar 78% dari plafon anggaran belanja daerah .

Berikut juga dtampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG:

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Peran focal point PUG sebagai pendorong penyusunan PPRG (GAP-GBS) di OPD belum seluruhnya dilaksanakan.	Pemanfaatan dokumen GAP-GBS perlu ada komitmen dari TAPD ataupun OPD penggerak PPRG yaitu Bappeda, BPKAD, Inspektorat dan DPMPPA

c. Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase Perempuan korban KDRT yang tertangani mencapai tingkat keberhasilan sebesar 114,25 %, dimana dari target 80 % jumlah korban KDRT perempuan yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah korban KDRT perempuan , realisasinya mencapai 91,40%

Capaian kinerja tersebut menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 Persentase Perempuan korban KDRT yang tertangani tercapai sebesar 86,76 % .

untuk indikator persentase perempuan korban KDRT yang tertangani didukung dengan adanya Komitmen dan sinergitas OPD, masyarakat, swasta, RS dan LSM untuk menangani kekerasan

Berikut juga dtampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator persentase perempuan korban KDRT yang tertangani :

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Masih adanya anggapan kekerasan adalah aib dan masalah pribadi, sehingga tidak melapor jika ada kekerasan	Koordinasi dan penguatan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kota Yogyakarta
2	Selama masa pandemi, adanya keterbatasan untuk konseling tatap muka	Webinar bersama Puspa terkait Adaptasi kebiasaan baru dan Kesehatan Reproduksi berbasis gender
3	Belum semua lembaga layanan memiliki sarana prasarana dan SDM kompatibel Kurangnya media KIE untuk mensosialisasikan perlindungan perempuan	Webinar dengan PKK dan Baznas untuk pencegahan kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, NAPZA, dan pola asuh anak dan remaja

1.2.2.3 Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta memiliki jumlah pegawai masih kurang dari kebutuhan. Namun demikian seluruh program dan kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa pekerjaan.

Dalam hal pendanaan, sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun Telah mencapai kinerja sebesar 127.03 % dengan efisiensi anggaran . Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran disebabkan karena

- Adanya Satgas sigrak di tiap kelurahan dalam mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk penjangkauan dan pendampingan
- Dibentuknya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam memberikan konseling bagi keluarga

3.2.3 Sasaran Kekerasan terhadap anak menurun

Tabel 3.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Jumlah korban KDRT usia anak/ jumlah penduduk usia anak x 100 %

Kinerja sasaran Kekerasan terhadap anak menurun dengan indikator Prevalensi kekerasan terhadap anak menurun pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,06%	0,13%	0,04%	166.33%	0,11%	160.21 %

Data Prevalensi Kekerasan terhadap anak diperoleh dari membandingkan antara jumlah korban KDRT anak dibandingkan dengan jumlah penduduk anak dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah korban KDRT anak

Jumlah Penduduk usia anak

49

----- x 100 % = 0,04 %

111.953

Pada tahun 2020 capaian Prevalensi Kekerasan terhadap anak mencapai 166.33 % , dimana dari target sebesar 0,13 % , terealisasi sebesar 0,04 % , artinya untuk sasaran kekerasan terhadap anak menurun dikatakan berhasil karena telah mencapai target pada tahun berjalan .

Capaian pada tahun 2020 didukung dengan adanya pembentukan perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) di 10 Kelurahan yaitu : Bumijo, Cokrodingratan, Giwangan, Tahunan, Mantrijeron, Sorosutan, Ngampilan, Kotabaru, Kadipaten dan Tegalpanggung sehingga secara keseluruhan sudah dibentuk di 36 Kelurahan. PATBM ini dimaksudkan untuk menguatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat dan bagaimana penerapan perlindungan anak. Pada tahun depan PATBM akan dibentuk di semua kelurahan yang belum membentuk PATBM dan diharapkan di setiap PATBM akan muncul relawan-relawan baru Perlindungan Anak ,Penguatan PATBM juga dilakukan dengan mengedepankan pelatihan penguatan konvensi hak anak dengan tujuan relawan PATBM semakin memahami hak-hak anak dan bagaimana melindunginya. Selain itu pada kegiatan Peningkatan Partisipasi dan Perlindungan Anak dilakukan pembentukan Sekolah Ramah Anak sebanyak 19 sekolah ramah anak yang dibentuk dari target 14 sekolah dan 5 sekolah dibentuk melalui zoom meeting .

Dampak bencana pandemi covid 19 juga dirasakan oleh anak-anak termasuk anak disabilitas oleh karenanya untuk menambah wawasan para guru mengenai sekolah bagi anak disabilitas pada masa pandemi maka diadakan zoom meeting dengan mengundang guru dari SRA.

Dalam rangka perlindungan anak dibentuk Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) pada tahun 2019 yang merupakan salah satu inovasi Bidang Perlindungan Anak, Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/ keluarga / orang yang bertanggung jawab terhadap anak , kegiatan puspaga berupa pelayanan bimbingan dan informasi kepada masyarakat, konsultasi, konseling, rujukan dan penjangkauan bagi klien yang terhalang untuk memperoleh pelayanan langsung di Puspaga. Puspaga terbentuk dengan dukungan dana hibah dari Kementerian PPPA berupa perlengkapan kantor, mebelair dan mainan anak. Puspaga sudah dilengkapi dengan psikolog dan didukung oleh tenaga pemberi layanan dari Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta.

Untuk mewujudkan hak partisipasi anak dalam pembangunan maka diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Anak di tingkat Kota Yogyakarta. Hasil Musrenbang Anak diteruskan kepada Bapak Walikota dan Kepala Bappeda agar dapat diusulkan melalui OPD

terkait. Selain itu diselenggarakan kongres anak sebagai wadah bagi anak untuk menyuarakan apresiasinya dengan menyusun “Suara Anak Kota Yogyakarta” dan memilih duta anak Kota Yogyakarta. Salah satu kluster Hak Anak yang menjadi tanggungjawab DPMPPA untuk terlibat dalam pemenuhannya adalah Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. DPMPPA memfasilitasi Lembaga pengasuhan alternatif untuk anak yang orangtuanya bekerja berupa Taman Pengasuhan Anak dan Kelompok Bermain sebanyak 3 lembaga yaitu TPA Prabardarma, TPA Beringharjo dan KB Kirana, akan tetapi berhubung terjadi bencana pandemi Covid maka ketiga Lembaga tersebut hanya membuka layanan sampai dengan Bulan Maret 2020.

Untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak maka dibentuk forum perlindungan khusus anak beranggotakan lintas OPD/intansi. Forum ini mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan-permasalahan anak baik korban kekerasan maupun permasalahan lainnya seperti anak jalanan, anak pengamen, anak terlantar.



Sosialisasi Perlindungan Anak



Reintegrasi



Trauma Healing



Deklarasi sekolah ramah anak

Pembentukan Dekelana

PATBM

Tabel 3.15 Akuntabilitas kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi										
1	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,74%	0,05%	0,15%	0,03%	0,14%	0,06%	0,13%	0,04%	0,12%	0,00%	0,11%	0,00%

3.2.3.1 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah Renstra;

Capaian kinerja pada tahun 2020 yang merupakan tahun keempat Renstra 2017 – 2022 ditargetkan sebesar 0,12%. Target kinerja tersebut dapat tercapai 0,04 % sehingga persentase capaian terhadap target di akhir masa Renstra sudah terpenuhi 160.21%.

Sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta berupa prevalensi kekerasan terhadap perempuan terealisasi 0,04 % atau tingkat capaian 166.33% sehingga berpredikat **tercapai amat baik**.

Sedangkan untuk indikator program yang mendukung sasaran kekerasan terhadap anak menurun, keempat indikator dapat tercapai sangat baik karena masing –masing indikator program dapat terealisasi melampaui target seperti terlihat di dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.16 Indikator Program Perlindungan Anak

No.	Indikator Program	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi										
1	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	31%	31,11%	53%	53,33%	66%	80%	90%	100%	95%	0,00%	100%	0,00%
2.	Persentase Puskesmas	60%	55,56%	70%	72,22%	80%	100,00%	100%	100%	100%	0%	100%	0%

	Ramah Anak												
3	Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	18,5%	17,12%	35%	35,14%	52%	61,26%	73.87%	77.48%	90,00%	0,00%	100,00%	0,00%
4	Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%

Keempat indikator program tersebut tercapai melampaui target,kecuali indikator persentase anak korban kekerasan, tiga indikator program yang tercapai melebihi target adalah persentase jumlah kelurahan layak anak, persentase puskesmas ramah anak dan persentase sekolah ramah anak, hal ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari kelurahan dan tokoh masyarakat setempat serta didorong oleh masih banyaknya kasus kasus kekerasan terhadap anak maupun pelaku kekerasan berusia anak.

Indikator Puskesmas ramah anak sudah mencapai target pada tahun 2019,seluruh puskesmas di Kota Yogyakarta sudah berpredikat Puskesmas Ramah Anak hal ini dikarenakan ada upaya dari puskesmas untuk memenuhi indikator-indikator pelayanan ramah anak di puskesmas sesuai dengan pedoman dari Kementerian PPPA sehingga pada tahun 2020 hanya dilakukan evaluasi saja terhadap puskesmas tersebut .

Indikator sasaran ketiga yaitu persentase sekolah ramah anak juga dapat terealisasi melebihi target hal ini didorong oleh semakin meningkatnya guru/kepala sekolah serta orang tua murid yang mengikuti sosialisasi tentang Sekolah Ramah Anak, saat pandemi FGD pembentukan SRA dilakukan melalui zoom meeting.

Persentase anak korban KDRT yang tertangani sesuai dengan target yaitu 100% karena telah dilakukan psikoedukasi dan reintegrasi terhadap anak yang rentan kekerasan di locus disamping itu semua anak korban kekerasan sudah mendapatkan penanganan dan pendampingan korban kekerasan terhadap anak (hukum dan psikologis) oleh UPT P2TP2A maupun lembaga layanan seperti puskesmas, rumah sakit dll

Tabel 3.17 Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya

No	Indikator program	Target Capaian		Realisasi Capaian			
		Thn 2019	Thn 2020	Thn 2019		Thn 2020	
				Realisasi	Tingkat Capaian	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	66%	90%	80%	121,21%	100%	111,11%
2	Persentase Puskesmas Ramah Anak	80%	100%	100%	125%	100%	100%
3	Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	52%	73.87%	61,26%	117,81%	77,48%	104,88%
4	Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi dengan capaian tahun sebelumnya menunjukkan adanya penurunan tingkat capaian dari tahun 2019 ke tahun 2020, hal tersebut dikarenakan terdapat reviu renstra pada tahun 2020 yang menyebabkan target untuk tahun 2020 disesuaikan dengan keadaan riil sehingga tidak ada tingkat capaian yang terlalu tinggi. Ada upaya-upaya percepatan/akselerasi pengembangan desa/kelurahan layak anak, Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak pada tahun 2019, Percepatan perlu dilakukan mengingat bahwa pada dasarnya pembentukan Dekelana, Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak adalah bagian dari strategi untuk pengembangan Kota Yogyakarta menjadi Kota Layak Anak yang sudah diamanatkan dalam Perda No.1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

3.2.3.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh keberhasilan seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompeten, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup.

Untuk keberhasilan tiap tiap indikator program yang mendukung sasaran kekerasan terhadap anak menurun dijabarkan sebagai berikut :

a. Persentase jumlah kelurahan layak anak

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase jumlah kelurahan layak anak mencapai tingkat keberhasilan sebesar 111.11 %, dimana dari target 90 % jumlah kelurahan layak anak dibandingkan dengan jumlah kelurahan realisasinya mencapai 100% . Capaian kinerja tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 persentase kelurahan layak anak baru tercapai sebesar 80 % dari 45 kelurahan di Kota Yogyakarta, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 100 % dimana semua kelurahan di Kota Yogyakarta sudah menjadi kelurahan layak anak.

Untuk faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator program persentase jumlah kelurahan layak anak dikarenakan adanya sinergitas yang baik dengan satgas SIGRAK dan PATBM sehingga memperlancar pembangunan komitmen DEKELANA dan peran aktif kampung ramah anak yang sudah terbentuk di wilayah tersebut.

Berikut juga ditampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator persentase jumlah kelurahan layak anak :

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Personil pengurus yang ditunjuk adalah aktifis di berbagai lembaga kemasyarakatan yang sudah ada sehingga menjadi kurang fokus	Koordinasi dengan Lurah sebelum dilaksanakan FGD pembentukan DEKELANA untuk membangun komitmen bersama tentang perlunya DEKELANA

b. Persentase puskesmas ramah anak

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase Puskesmas Ramah Anak mencapai tingkat keberhasilan sebesar 100 %, dimana dari target 100 % ,jumlah puskesmas

ramah anak dibandingkan dengan jumlah puskesmas di kota Yogyakarta realisasinya mencapai 100 %. Pada tahun 2019 sudah terbentuk 18 puskesmas ramah anak dan sudah melampaui target sampai akhir tahun 2022 .

Untuk faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator program persentase puskesmas ramah anak adalah dengan Komitmen Kepala Dinas Kesehatan yang cukup tinggi dalam pemenuhan hak anak di bidang kesehatan melalui pelayanan ramah anak di puskesmas serta sudah terpenuhinya Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) Puskesmas..

Berikut juga ditampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator Persentase puskesmas ramah anak :

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Monitoring & evaluasi puskesmas ramah anak belum dapat dilakukan secara rutin tiap tahun karena terkendala SDM Bidang PA	Monev dilakukan melalui dinas kesehatan dan pada saat diadakan workshop penguatan KHA bagi petugas puskesmas
2.	Kondisi puskesmas yang terbatas luasannya sehingga tidak memungkinkan untuk pengembangan layanan	mengupayakan untuk melengkapi SARPRAS ramah anak di puskesmas

c. Persentase sekolah ramah anak

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase Sekolah Ramah Anak mencapai tingkat keberhasilan sebesar 117,81 %, dimana dari target 73.87 % jumlah Sekolah Ramah Anak dibandingkan dengan jumlah sekolah terealisasi sebesar 77.48 % Capaian kinerja tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 persentase Sekolah Ramah Anak baru tercapai sebesar 61.26 % atau sebanyak 68 sekolah dari 111 Sekolah di Kota Yogyakarta, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 77.48% , atau sebanyak 86 dari 111 sekolah.

Untuk faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator program persentase sekolah ramah anak dikarenakan Adanya kerjasama dengan yayasan/ormas penyelenggara sekolah swasta untuk pengembangan SRA di sekolah - sekolah yang berada di bawah naungan yayasan/ormas tersebut, Keaktifan beberapa sekolah yang telah menjadi Sekolah Ramah Anak lebih awal dalam mengkampanyekan kegiatan-kegiatan Sekolah Ramah Anak serta adanya fasilitas SRA tingkat nasional yang telah mengikuti pelatihan di pusat.

Berikut juga ditampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator Persentase sekolah ramah anak

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Pembentukan Sekolah Ramah Anak di masa pandemi sulit dilakukan karena tidak mungkin menghadirkan banyak orang dan apabila dilakukan secara daring peran serta orangtua dan siswa rendah khususnya diawal pandemi dimana keterbatasan sarana prasarana masih dirasakan	Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak Mengikutsertakan fasil nasional SRA untuk mengkampanyekan SRA dalam workshop SRA
2	OPD terkait kurang dalam mendorong sekolah untuk menginisiasi secara mandiri menjadi Sekolah Ramah Anak, padahal 5 komponen Sekolah Ramah Anak dari 6 komponen yang ada menjadi kewenangan OPD terkait	Dilakukan sosialisasi tentang SRA dengan mengundang semua sekolah: TK, SD, SMP sebelum dilakukan FGD pembentukan SRA di masing-masing sekolah

d. Persentase anak korban KDRT yang tertangani

Capaian kinerja program dengan indikator kinerja Persentase anak korban KDRT yang tertangani mencapai tingkat keberhasilan sebesar 100 %, dimana dari target 100 %, jumlah anak korban KDRT yang tertangani dalam 12 bulan terakhir dibandingkan dengan jumlah anak korban KDRT yang melapor pada periode yang sama , realisasinya juga mencapai target yaitu 100 %. Capaian kinerja tersebut menunjukkan dapat mempertahankan capaian dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 Persentase anak korban KDRT yang tertangani tercapai sebesar 100 %, dan pada tahun 2020 juga tercapai sebesar 100 % . Adapun jumlah korban anak sebanyak 49 orang dan semua dapat tertangani, faktor penyebab keberhasilan tercapainya indikator persentase anak korban KDRT yang tertangani adalah dengan adanya kerjasama dan sinergisitas yang baik antar OPD, lembaga pemerhati perempuan dan anak, wilayah dan sekolah locus kejadian, Sekolah dan wilayah cukup terbuka dengan adanya kejadian tindak kekerasan terhadap anak di sekolah/wilayahnya, mau bekerjasama dengan UPT P2TP2A dan mendukung dalam penanganan, pendampingan korban , reintegrasi dan psikoedukasi.

Berikut juga ditampilkan faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah untuk indikator Persentase anak korban KDRT yang tertangani

No.	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Permasalahan anak khususnya kekerasan ditangani oleh beberapa Lembaga baik pemerintah maupun swasta sehingga sangat mungkin terjadi duplikasi atau bahkan tidak tertangani secara tuntas	Meningkatkan sinergitas antara OPD dan Lembaga Layanan Anak baik dalam penanganan maupun pelaporan
2	Belum semua lembaga Layak Anak memiliki Sarana prasarana dan SDM yang kompeten	Membentuk TIM Perlindungan Anak yang terdiri dari berbagai unsur (LSM,OPD,KPAI,DLL)

3.2.2.3 Analisis efisiensi sumber daya dengan cara sebagai berikut

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta memiliki jumlah pegawai masih kurang dari kebutuhan. Namun demikian seluruh program dan kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun sebagian pegawai harus mengampu beberapa pekerjaan. Dalam hal pendanaan, Sasaran kekerasan terhadap anak menurun Telah mencapai kinerja sebesar 169,23 % dengan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran didukung dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga selain itu karena adanya pandemi sehingga membuat terobosan baru dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang tidak menggunakan anggaran seperti melaksanakan pembentukan sekolah ramah anak dengan zoom meeting, peringatan hari anak nasional dengan melibatkan beberapa sponsor dari CSR dll.

3.3 Realisasi Anggaran

Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2020 dengan total anggaran sebesar Rp. 3.723.783.765,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.673.461.295,51 , tingkat capaian untuk tahun 2020 yaitu 98.65 % , naik sebesar 4.47 % dari tahun 2019 yang tingkat capaiannya mencapai 94.18 % .

Tabel 3.18 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020

No	Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2019	7.250.045.744,00	6.828.410.727,19	94,18%
2	2020	3.723.783.765,00	3.673.461.295,51	98.65%

Sumber : Fungsional Keuangan DPMPPA, 2020

3.3.1 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020

Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 1.652.737.015,00 dari total anggaran Rp. 1.941.933.000,00 , tingkat capaian untuk tahun 2020 adalah sebesar 85.10 % menurun 10.68 % dari tahun 2019 yang tingkat capaiannya hanya sebesar 95.78 % . Terkait serapan yang menurun dari tahun 2019 dikarenakan dari adanya anggaran untuk calon pegawai dan mutasi pegawai yang meleset dari perkiraan .

Tabel 3.19 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian 2020	% Capaian 2019
1	Belanja Pegawai	1.941.933.000,00	1.652.737.015,00	85,10%	95,78%

Sumber : Fungsional Keuangan DPMPPA, 2020

3.3.2 Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020

Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 3.673.461.296,51 dari total anggaran Rp3.723.783.765, tingkat capaian untuk tahun 2020 adalah sebesar 98.65 % mengalami peningkatan sebesar 4.47 % dari tahun 2019 yang tingkat capaiannya sebesar 94.18 % .

Tabel 3.20 Realisasi Belanja Langsung 2020

Uraian	Alokasi Anggaran	Realisasi	% 2020	% 2018
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp679.240.918	Rp650.637.893,30	95,79%	93,21%
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp85.032.000	Rp84.371.450	99,22%	98,44%
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp594.208.918	Rp566.266.443,30	95,30%	91,14%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp230.659.928	Rp227.586.297	98,67%	97,45%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Rp178.106.928	Rp175.385.000	98,47%	98,68%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp52.553.000	Rp52.201.297	99,33%	93,23%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Rp71.402.824	Rp71.321.194,40	99,89%	99,45%

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Rp71.402.824	Rp71.321.194,40	99,89%	99,45%
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Rp827.746.108	Rp823.567.387,60	99,50%	93,58%
Pembinaan Pengarusutamaan Gender	Rp156.601.784	Rp154.384.264,40	98,58%	92,56%
Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan	Rp292.942.324	Rp292.770.594,40	99,94%	96,57%
UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Rp378.202.000	Rp376.412.528,80	99,53%	91,52%
Program Perlindungan Anak	Rp1.132.591.976	Rp1.130.379.165,61	99,80%	93,12%
Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	Rp146.575.000	Rp145.296.000	99,13%	91,88%
Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak	Rp986.016.976	Rp985.083.165,61	99,91%	93,77%
Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp782.142.011	Rp769.969.358,6	98,44%	97,04%
Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	Rp444.777.227	Rp443.968.044,20	99,82%	97,24%
Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Rp337.364.784	Rp326.001.314,40	96,63%	96,80%
Jumlah	Rp3.723.783.765	Rp3.673.461.296,51	98,65%	94,18%

Sumber : Fungsional Keuangan DPMPPA, 2020

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 98.65 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 99.25 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98.11 %. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran kekerasan terhadap anak menurun (99.80%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran pemberdayaan masyarakat meningkat (98.44%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi	Realisasi (%)
						(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	29%	40.59 %	139.97 %	Rp.782.142.011	Rp.769.969.358,60	98.44%
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,12%	0,09 %	127.03 %	Rp.827.746.108,00	Rp.1.130.379.165,61	99.50%
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,13%	0,04 %	166.33 %	Rp.1.132.591.976,00	Rp.1.130.379.165,61	99.80%
Jumlah						Rp2.742.480.095,00	Rp2.723.915.911,81	
Total Belanja Langsung						Rp3.723.783.765,00	Rp3.673.461.296,51	

Tabel 3.22 Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	139.97 %	98.44%	1.56%
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	127.03 %	99,50%	0,50%
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	166.33%	99,80%	0,20%

Analisis Efisiensi

Dari ketiga Sasaran strategis, semua sasaran kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Pemberdayaan masyarakat meningkat Telah mencapai kinerja sebesar 139.97 % dengan efisiensi anggaran 1.56 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui swadaya yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam membranding kampung sesuai dengan potensi wilayah.
2. Sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun Telah mencapai kinerja sebesar 127.03 % dengan efisiensi anggaran 0,50 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran disebabkan karena
 - Adanya Satgas sigrak di tiap kelurahan dalam mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk penjangkauan dan pendampingan
 - Dibentuknya PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam memberikan konseling bagi keluarga
3. Sasaran kekerasan terhadap anak menurun Telah mencapai kinerja sebesar 166.33 % dengan efisiensi anggaran 0,20%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran didukung dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga selain itu karena adanya pandemi sehingga membuat terobosan baru dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang tidak menggunakan anggaran seperti melaksanakan pembentukan sekolah ramah anak dengan zoom meeting, peringatan hari anak nasional dengan melibatkan beberapa sponsor dari CSR dll.

3.4 Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2020 ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

1. PISA

Dalam rangka pemenuhan hak anak atas informasi yang layak anak maka ditetapkan dua PISA yaitu PISA Taman Pintar dan PISA Pevita. Baik PISA Taman Pintar maupun PISA Pevita sebetulnya merupakan perpustakaan anak yang dikembangkan dengan dilengkapi berbagai sumber informasi dan sarana kreatifitas anak seperti kelas mendongeng, kelas menulis, sudut mainan anak pada Pevita dan panggung boneka pada Taman Pintar serta disediakan petugas pemberi layanan yang ramah anak dan telah memperoleh pelatihan tentang KHA

Pada tahun 2020 urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memperoleh penghargaan tingkat nasional dari KPAI (pusat) yakni penghargaan SIMEP (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan). Ada lima indikator yang menjadi acuan penilaian lomba anugerah KPAI tersebut, yaitu : regulasi, kelembagaan dan sumber daya manusia, program dan anggaran, pelayanan kasus yang ditangani, perlindungan hukum dan system peradilan anak

2. Hotline Service dan Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Aduan Kekerasan Anak dan Perempuan Berbasis Gender)

Dalam rangka memberikan kemudahan akses pelaporan masyarakat terkait adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender dan untuk mengakselerasi pelayanan penjangkauan terhadap korban kekerasan di wilayah, masyarakat sudah secara aktif menggunakan hotline service dan aplikasi SIKAP.

Dalam operasionalisasi Aplikasi SIKAP yang terintegrasi dengan JSS masih terdapat kendala, antara lain adanya beberapa menu dalam aplikasi SIKAP yang masih perlu disempurnakan. Untuk menyikapi adanya kendala tersebut maka dilakukan upaya mengoptimalkan koordinasi teknis dengan Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta (sebagai OPD pengampu rancang bangun aplikasi) agar dapat menyempurnakan aplikasi SIKAP

3. Relawan Mengajar

Relawan mengajar adalah sebuah gerakan sosial yang lahir di masa pandemi covid 19 merupakan program Kota Yogyakarta sebagai solusi bagi anak yang sedang melaksanakan Sekolah From Home. Berbagai keluhan yang muncul di masa WFH ini seperti orangtua yang tidak bisa mendampingi karena berbagai alasan, keterbatasan sarana prasarana dan juga anak merasa libur sehingga tidak perlu belajar.

Permasalahan itulah yang akhirnya menggerakkan seluruh elemen (5K) yang ada di masyarakat untuk membantu mendampingi, mengarahkan dan memfasilitasi anak-anak dari jenjang pendidikan SD dan SMP khususnya yang memiliki keterbatasan agar tetap bisa melaksanakan belajar selama masa pandemi. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun jejaring menjadi sebuah gerakan yang diberi nama Relawan Mengajar.

Tujuan Relawan Mengajar :

- Membantu anak-anak belajar selama masa Sekolah From Home khususnya anak-anak yang orangtuanya tidak dapat mendampingi dalam proses belajar di rumah.
- Mengarahkan anak-anak selama Sekolah From Home agar tetap terarah misal mengurangi bermain gadget, mengurangi bermain keluar kampung, dll
- Membantu anak-anak yang kurang mampu dalam hal pemanfaatan quota dengan memfasilitasi menggunakan wifi tempat publik.
- Membantu bagi anak-anak yang akan mencari sekolah secara onlinee.
- Membantu anak-anak yang belajar untuk menghadapi ujian sekolah.
- Memberikan pelatihan life skill selama covid 19 dan menghadapi new normal

4. Relawan Hijau

Merupakan sebuah gerakan integrasi atau kemandirian antar sektor dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menuju pada ketahanan pangan mandiri yang berwawasan lingkungan. Membangun jejaring mulai dari pemanfaatan lahan sampai dengan pemasaran melalui RPK, minimart dan agromart

Tujuan relawan hijau :

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong dan lahan tidur sebagai lahan pertanian
- Membangun jejaring kolaborasi dan integrasi antar semua elemen dalam sinergi bersama
- Peningkatan hasil pertanian perkotaan sampai pada peningkatan ekonomi masyarakat

Langkah-langkah yang dilakukan relawan hijau yaitu:

- Pemanfaatan lahan sekitar rumah dan lahan tidur untuk pengembangan family farming (pertanian keluarga)

- Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampung hijau dan program kampung iklim
- Membangun integrasi antar elemen dalam mewujudkan halaman indah asri teratur dan nyaman
- Membangun jejaring proses produksi sampai dengan pasca panen dan pemasaran hasil produksi

5. Relawan Sehat Dapur Balita

Merupakan sebuah gerakan pemberdayaan yang muncul di masa pandemi covid 19 yang diinisiasi oleh TP PKK Kota Yogyakarta sebagai salah satu solusi bagi pemantauan gizi dan kesehatan khususnya untuk pemberian makanan tambahan bagi balita selain yg selama ini diberikan melalui posyandu. Dapur balita tumbuh dari swadaya masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungannya.

Dapur balita peduli Covid 19 juga bertujuan memantau tumbuh kembang anak melalui orang tua, selain itu secara sosial untuk meningkatkan gotong royong peduli bagi anak, sebagai individu yang rentan selama masa pandemi. Dan tujuan jangka panjang adalah dengan berbagi makanan yang bergizi secara rutin sebagai upaya pencegahan stunting. Sebuah gerakan aksi sosial dari -oleh-untuk masyarakat dalam upaya pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita.

Kegiatan ini hanya melibatkan orangtua /ibu bayi balita saja untuk hadir ke dapur balita peduli Covid 19 selain untuk mengambil makanan tambahan gizi seimbang juga untuk bersama-sama dengan Relawan sehat sharing tentang kesehatan bayi/balitanya. Relawan sehat dapur balita peduli Covid19, selain mendistribusikan makanan tambahan gizi seimbang Juga memberikan informasi tentang bagaimana orangtua memiliki ketrampilan dalam melaksanakan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita nya secara mandiri di rumah masing-masing.

Kegiatan saat buka dapur balita tidak hanya sekedar ngluwihi mbagehi dengan memberikan paket gizi saja tapi juga ngluwihi mbagehi dalam hal edukasi untuk orang tua atau keluarga balitanya. Terlebih untuk saat sekarang ini kegiatan dapur balita peduli Covid 19 “ngluwihi mbagehi” sudah mengalami pengembangan dengan adanya POJOK SOLUSI yang merupakan wujud sinergitas dari relawan sehat dapur balita dengan satgas SIGRAK. Sebagai bentuk upaya preventif dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga

6. Mobil Gender Corner

Merupakan pengembangan dari Gender Corner, yang biasanya merupakan kegiatan yang menetap di Car Free Day ataupun di masyarakat. Mobil Gender Corner bersifat mobile dengan tujuan :

- i. Penjangkauan layanan konseling kepada masyarakat (jemput bola)
- ii. Perluasan jangkauan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Issue Gender di bidang politik, sosial, budaya, kesehatan dan ekonomi kepada masyarakat, sekolah, maupun kampus

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis ketiga sasaran, terdapat tiga indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2020, 3 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar > 100 % dari total indikator.
2. Faktor keberhasilan
 - a. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah meningkat;
 - b. pengembangan wilayah berdasarkan potensi wilayah melalui gowes dodolan kampung dengan melibatkan OPD terkait, asosiasi LPMK dan komunitas;
 - c. penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terpadu dengan mensinergikan layanan yang berjejaring);
 - d. melaksanakan kegiatan reintegrasi dan psiko edukasi dalam rangka meminimalisasi resiko berulangnya kejadian kekerasan di satu lokasi;
 - e. Terbangunnya sistem aplikasi pelaporan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender (aplikasi SIKAP);
 - f. Adanya komitmen dan sinergitas OPD, masyarakat, swasta, RS dan LSM dalam penanganan kekerasan berbasis gender ;
 - g. Komitmen masyarakat di tingkat kelurahan yang didukung oleh aparat pemerintah kelurahan untuk percepatan untuk mendukung kota layak anak;
 - h. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan perlindungan anak;
 - i. Adanya sinergitas antara Satgas Sigrak, UPT P2TP2A, Dinas Sosial , KPAID dan lembaga lain dalam penanganan kasus anak.
 - j. Ada kerjasama dan sinergitas yang baik antar OPD, lembaga pemerhati perempuan dan anak, wilayah dan sekolah lokasi kejadian

- k. Sekolah dan wilayah cukup terbuka dengan adanya kejadian tindak kekerasan terhadap anak di sekolah/wilayahnya, mau bekerjasama dengan UPT P2TP2A dan mendukung dalam penanganan, pendampingan korban , reintegrasi dan psikoedukasi
 - l. narasumber reintegrasi dan psikoedukasi profesional di bidangnya sehingga menarik minat anak untuk mengikuti edukasi sampai selesai.
3. Meskipun secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dikatakan berhasil, terkadang masih dijumpai adanya kendala/hambatan yaitu:
- a. Penganggaran dan perencanaan kegiatan untuk pengembangan wilayah belum semua optimal;
 - b. kurangnya kompetensi pimpinan atau pengurus lembaga kemasyarakatan sehingga lemah dalam penyusunan program dan kegiatan lembaga
 - c. Pembentukan Sekolah Ramah Anak di masa pandemi sulit dilakukan karena tidak mungkin menghadirkan banyak orang dan apabila dilakukan secara daring peran serta orangtua dan siswa rendah khususnya diawal pandemi dimana keterbatasan sarana prasarana masih dirasakan;
 - d. OPD terkait kurang dalam mendorong sekolah untuk menginisiasi secara mandiri menjadi Sekolah Ramah Anak, padahal 5 komponen Sekolah Ramah Anak dari 6 komponen yang ada menjadi kewenangan OPD terkait
 - e. Kurang optimalnya komitmen dan kapasitas beberapa anggota Satgas Sigrak dalam merespon kejadian kekerasan di wilayahnya;
 - f. Kurang optimalnya akses masyarakat terhadap Hotline Service SIKAP dalam pelaporan kejadian kekerasan di Kota Yogyakarta;
 - g. tidak semua anak korban kekerasan dapat memahami bahwa yang dialaminya adalah tindak kekerasan
 - h. kesulitan mencari waktu terbaik kegiatan reintegrasi, trauma healing supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar anak.
 - i. klien ABK belum mendapatkan secara optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana serta pendamping khusus disabilitas
4. Sebagai upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang , Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada di wilayah;
 - b. Meningkatkan capaian implementasi penyusunan GAB GBS sesuai ketentuan agar menjawab isu gender (termasuk didalamnya isu strategis dan isu prioritas daerah)
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan keterampilan menganalisa isu gender maupun menyusun GAB GBS di setiap OPD
 - d. Peningkatan kapasitas Satgas Sigrak secara lebih intensif untuk membantu dan bersinergi dengan UPT P2TP2A dalam penjangkauan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan

dan anak berbasis gender, sehingga mampu memenuhi target waktu penjangkauan kasus di wilayah;

- e. Melakukan kegiatan Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak, Hotline Service SIKAP, melalui berbagai media informasi dan komunikasi (radio, televisi, video animasi, leaflet, media sosial dan tatap muka langsung dengan masyarakat)
- f. Menjalin komunikasi yang intensif agar terwujud persamaan persepsi dengan berbagai lembaga jejaring dalam pelayanan penanganan korban kekerasan berbasis gender;
- g. Memandirikan aparat wilayah dalam mengembangkan upaya-upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak seperti desa/kelurahan layak anak, Kecamatan Layak Anak, Kampung Ramah Anak, Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat, Forum Anak
- h. Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan OPD dalam upaya penyelesaian isu gender dan pembangunan;
- b. Mendorong dan meningkatkan kapasitas SDM focal point PUG dalam menyusun GAB GBS;
- c. Pemetaan potensi kekerasan di masing masing wilayah;
- d. Pemetaan jejaring kerja;
- e. Pendataan kelompok usaha perempuan;
- f. Peningkatan jejaring kerja 5K;
- g. Pemetaan Kampung Ramah Anak;
- h. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perempuan;
- i. Promosi, KIE terkait Pemberdayaan Masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak.

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

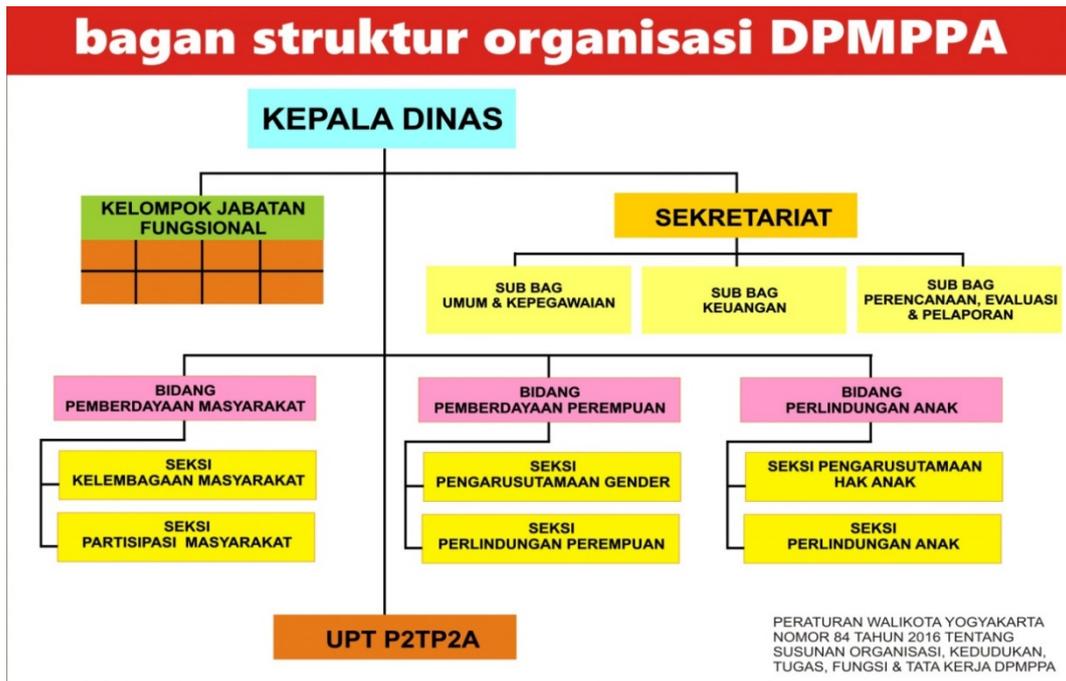
Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

Lampiran 5. Rencana Aksi

Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 7. Penghargaan yang pernah diterima

Lampiran 1. Struktur Organisasi



Lampiran 2. Perencanaan Strategis (Matriks Renstra lima tahun)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan					
				2017	2018	2020	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	%	26,15%	27,00%	28,00%	29,00%	30,00%	31,00%
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,65%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%	0,10%
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,74%	0,15%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 5158662
E-Mail : pmp2a@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.EDY MUHAMMAD
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. HARYADI SUYUTI
Jabatan : WALIKOTA YOGYAKARTA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 27 JAN 2020

Pihak Pertama,


H. HARYADI SUYUTI


IR. EDY MUHAMMAD
NIP. 196309161992031006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis kampung	29,00
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan	0,12
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi Kekerasan terhadap anak	0,13

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp 2.243.679.624	APBD
2 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Rp 1.835.431.020	APBD
3 Program perlindungan Anak	Rp 2.177.682.576	APBD



 Wali Kota Yogyakarta

 HARYADI SUYUTI

Yogyakarta, 27 JAN 2020
 Kepala Dinas PMPPA


 Eddy Muhammad
 NIP.196309161992031006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 5158662
E-Mail : pmp2a@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. EDY MUHAMMAD

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. HARYADI SUYUTI

Jabatan : WALIKOTA YOGYAKARTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 12 NOV 2020

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

H. HARYADI SUYUTI


EDY MUHAMMAD
NIP. 196209161992031006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	29,00
2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,12%
3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,13%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp 782.142.011,-	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Rp 827.746.108,-	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
3	Program Perlindungan Anak	Rp 1.132.591.976,-	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Yogyakarta, 12 NOV 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Wali Kota Yogyakarta

HARYADI SUYUTI


MUHAMMAD
NIP. 196309161992031006

Lampiran 5. Rencana Aksi

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN : 2020

No	Sasaran	Indikator	Target 2020				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2020				Anggaran	
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat		29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	0,25%	0,50%	0,75%	1,00%	782.142.011	
								Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	83	83	83	83		
								Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	33,64%	66,09%	90,85%	100,00%	444.777.227	
								1 Kelembagaan LPMK Yang Didampingi	45 LPMK	30,00 %	60,00 %	90,00 %	100,00 %	331.862.427
								Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta Yang Di Dampingi	1 TP.PKK Kota Yogyakarta	45,00 %	85,00 %	94,00 %	100,00 %	109.107.800
								3 Evaluasi Kelembagaan Masyarakat	40 Lembaga	25,00 %	55,00 %	75,00 %	100,00 %	3.807.000
								Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	33,11%	53,16%	89,33%	100,00%	337.364.784	
								1 Swadaya murni masyarakat yang didata	45 Kelurahan	35,00 %	50,00 %	90,00 %	100,00 %	1.000.000
								TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan	3 tahap	29,00 %	50,00 %	89,00 %	100,00 %	28.425.000
								3 Pokjanal Posyandu yang didampingi	14 Pokjanal	29,00 %	50,00 %	89,00 %	100,00 %	197.064.784
								4 Kelurahan lokasi P2WKSS yang didampingi	5 Kelurahan	63,00 %	76,92 %	90,00 %	100,00 %	37.025.000
								5 Kampung yang dibina dan dievaluasi	11 Kampung	32,00 %	51,72 %	90,00 %	100,00 %	40.328.000
								6 Forum gandeng gendong	1 Dokumen	29,00 %	50,00 %	90,00 %	100,00 %	33.522.000
								Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	60,00%	62,00%	64,58%	64,58%	827.746.108
									Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	14	28	42	58,82	
									Persentase Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	20	40	60	80	
									Pembinaan Pengarusutamaan Gender	14,40%	24,07%	95,40%	99,91%	156.601.784
		1 OPD yang melaksanakan ARG	30 OPD	15,58 %	47,38 %	84,20 %	100,00 %	44.675.784						
		2 Kelompok sadar gender yang didampingi	0.00 kelompok	71,70 %	100%	100%	100%	500.000						
		3 Data pilah gender dan anak	1 dokumen	11,23 %	13,56 %	100,00 %	100,00 %	50.135.000						
		4 Frekuensi pendampingan kelembagaan organisasi perempuan	3 kali	50,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	8.825.000						
		5 Gender Corner	1 kali	50,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	1.908.000						
		6 Penyusunan Kajian Analisis Isu Gender	1 dokumen	15,00 %	65,00 %	100,00 %	100,00 %	50.558.000						

2	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan		73,50%	76,84%	78,56%	83,15%	292.942.324							
							1 Pendidikan Politik Perempuan	1 Kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	8.960.000							
							2 dan Hari Anti Kekerasan	1 Kali	80,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	6.320.000							
							3 Pengembangan kelompok rintisan usaha Prima Amarta tahap 2 dan tahap 3	13 Kelompok	90,00 %	95,00 %	95%	100,00 %	153.722.700							
							4 Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) yang didampingi	1 Kali	71,00 %	82,00 %	89,00 %	100,00 %	67.163.624							
							5 Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) yang didampingi	1 Kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	4.456.000							
							6 Frekuensi Peningkatan Kapasitas Kader Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	4 Kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52.320.000							
							Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)		25,59%	58,17%	78,81%	100,01%	378.202.000							
							1 Penanganan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan berbasis gender	50 kasus	30%	58%	75%	100,00 %	287.112.800							
							2 Peningkatan Kapasitas tentang Perundangan Kekerasan pada Lokus	0 kali	50,00 %	50,00 %	55,00 %	100,00 %	23.396.000							
							3 Penguatan Satgas Siap Gerak Anti Kekerasan	105 orang	20,00 %	20,00 %	30,00 %	100,00 %	66.373.000							
							4 Pengelolaan Sistem Pendataan dan Pelaporan	12 bulan	25,00 %	50,00 %	73,00 %	100,00 %	1.320.200							
							3	Kekerasan terhadap anak menurun	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	Program Perlindungan Anak	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	1.132.591.976
															Persentase Anak Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tertangani	100	100	100	100	
	Persentase Puskesmas Ramah Anak	100	100	100	100															
	Persentase Sekolah Ramah Anak (sekolah Negeri TK s/d SMP)	61	61	73,87	73,87															
	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	74,01%	87,38%	94,53%	99,99%	146.575.000														
1 Konggres Anak Kota Yogyakarta	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	54.475.000														
2 Dekelana (Desa/Kelurahan Layak Anak) baru	10 kelurahan	98,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	21.905.000														
3 Pendampingan RAD KLA (Kota Layak Anak)	1 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	3.550.000														
4 Data indikator KLA (Kota Layak anak) yang update dan valid	1 dokumen	40,00 %	55,00 %	97,00 %	100,00 %	42.727.000														
5 Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kota	0 kali	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	1.238.000														
6 Peringatan Hari Anak Nasional	1 kali	25,00 %	75,00 %	100,00 %	100,00 %															

	Penguatan Peran Media Masa dan Dunia									
7	Usaha dalam pemenuhan Hak Anak	1 kali	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %				4.500.000
8	Penguatan Konvensi Hak Anak	2 kali	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %				18.180.000
	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak		26,71%	51,80%	75,86%	100,00%				986.016.976
1	Sekolah Ramah Anak yang dibentuk	14 sekolah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %				32.500.500
2	Pendampingan Sekolah Ramah Anak	0 sekolah	90.00 %	93.00 %	100.00 %	100.00 %				97.900.000
	Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu									
3	Berbasis Masyarakat	10 PATBM	55.00 %	80.00 %	100.00 %	100.00 %				18.380.000
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan									
4	Anak	1 kali	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %				21.600.000
	TPA Beringharjo , Prabadarma, KB Kirana									
5	yang didampingi	3 lembaga	28.00 %	50.00 %	71.00 %	100.00 %				762.776.476
	Pusat Pembelajaran Keluarga yang dibentuk									
6		1 lembaga	35.00 %	52.00 %	70.00 %	100.00 %				47.000.000
	Perlindungan khusus anak									
7		1 forum	25.00 %	50.00 %	80.00 %	100.00 %				5.860.000

Yogyakarta,

Mengetahui,

 NIP. 196304111992031006

Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
E MAIL : pmp2a@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001,2740 HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Menyempurnakan penerapan reward sebagai hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan.	Pemberiann reward dan punishmenT
2.	Melengkapi SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan mekanisme yang jelas apabila terdapat kesalahan data.	Menyusun SOP pengumpulan data Kinerja Pegawai
3.	Melengkapi monitoring capaian target kinerja eselon III dan IV yang telah dilaksanakan dengan SOP.	Monitoring capaian kinerja eselon III dan IV setiap bulan, menyusun SOP monitoring capaian eselon III dan IV
4.	Memaksimalkan penerapan reward and punishment terkait capaian kinerja eselon III dan IV yang telah diukur.	Pemberian berita acara , menyusun SK reward and punishment pegawai
5.	Memaksimalkan penggunaan Laporan Kinerja sebagai instrumen perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.	Evaluasi capaian kinerja dengan membandingkan laporan fisik dengan laporan keuangan (Data laporan fisik dan keuangan (sumber dari PPTK, data dalbang dan

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		SIPKD)
6.	Memaksimalkan pemanfaatan format Desk Timbal Balik sebagai instrumen evaluasi Rencana Aksi dan evaluasi Program dalam perbaikan pelaksanaan Rencana Aksi dan pelaksanaan program.	Menginventarisir, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rekomendasi desk timbal balik, notulensi kordinasi tindak lanjut hasil desk timbal balik

Yogyakarta, Januari 2021

KEPALA DPMPPA



In Edy Muhammad

NIP 19630916 199203 1 006



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTA
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Lampiran 7. Penghargaan yang diterima DPMPPA

No	Prestasi	Penerima
1.	JUARA III PENILAIAN KINERJA KEARSIPAN ANTAR PERANGKAT DAERAH,UNIT KERJA,DAN BUMD TINGKAT KOTA YOGYAKARTA	UPT P2TP2A
2.	JUARA III TINGKAT DIY HARI KESATUAN GERAK PKK KE-48	TIM PENGGERAK PKK KOTA YOGYAKARTA
3.	JUARA II TINGKAT DIY LOMBA MENJAHIT BUSANA RUMAH (BUKAN DASTER) LENGKAP DENGAN MASKERNYA	TIM PENGGERAK PKK KOTA YOGYAKARTA
4.	JUARA III TINGKAT DIY LOMBA MENJAHIT BUSANA RUMAH (BUKAN DASTER) LENGKAP DENGAN MASKERNYA	TIM PENGGERAK PKK KOTA YOGYAKARTA
5.	JUARA HARAPAN II TINGKAT DIY LOMBA MENJAHIT BUSANA RUMAH (BUKAN DASTER) LENGKAP DENGAN MASKERNYA	TIM PENGGERAK PKK KOTA YOGYAKARTA
6.	JUARA III LOMBA HASIL MASAK MENU MAKAN SIANG (B2SA)	TIM PENGGERAK PKK KOTA YOGYAKARTA
7.	Mendukung Perencanaan dan Pencapaian Kota Terbaik Ke 2 tingkat Nasional dari Kementrian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melalui program Gandeng Gendong	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
8.	Mendukung Innovative Government Award (IGA) tahun 2020 dari Kemenpan RB melalui program Gandeng Gendong	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA